

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data panel menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) mengenai pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Upah Minimum kabupaten/kota (UMK), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2016–2025, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi rata-rata lama sekolah yang dimiliki masyarakat, maka tingkat pengangguran terbuka cenderung menurun. Peningkatan tingkat pendidikan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keterampilan, produktivitas, serta daya saing tenaga kerja sehingga peluang untuk memperoleh pekerjaan menjadi lebih besar.
2. Upah Minimum kabupaten/kota (UMK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan UMK cenderung diikuti oleh peningkatan tingkat pengangguran terbuka. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kenaikan upah minimum dapat meningkatkan biaya tenaga kerja yang harus ditanggung perusahaan sehingga berpotensi mendorong efisiensi tenaga kerja dan mengurangi penyerapan tenaga kerja baru.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk yang aktif memasuki pasar kerja tidak selalu diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja yang tersedia. Akibatnya, sebagian angkatan kerja tidak mampu terserap ke dalam pasar kerja sehingga tingkat pengangguran terbuka meningkat.
4. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Upah Minimum kabupaten/kota (UMK), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2016–2025. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tertentu, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek pendidikan, ketenagakerjaan, maupun kondisi pasar kerja.
5. Berdasarkan nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,588538, variabel Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Upah Minimum kabupaten/kota (UMK), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mampu menjelaskan variasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 58,85 persen. Sementara itu, sisanya sebesar 41,15 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Upah Minimum kabupaten/kota (UMK), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kabupaten/kota di

Provinsi Jawa Barat periode 2016–2025, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan terus meningkatkan akses dan kualitas pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan guna meningkatkan rata-rata lama sekolah masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui perluasan akses pendidikan, pemberian beasiswa bagi masyarakat kurang mampu, penguatan pendidikan vokasi, serta peningkatan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan diharapkan mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, pemerintah daerah perlu mendorong terciptanya lapangan kerja baru melalui peningkatan investasi, pengembangan sektor industri padat karya, penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengembangan ekonomi kreatif. Langkah tersebut penting untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat setiap tahunnya.

2. Bagi Pemerintah dalam Penetapan Kebijakan Upah Minimum

Pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi pasar tenaga kerja, tingkat produktivitas tenaga kerja, kemampuan perusahaan, serta kondisi perekonomian daerah dalam menetapkan Upah Minimum kabupaten/kota (UMK). Penetapan UMK yang terlalu tinggi tanpa diimbangi peningkatan produktivitas tenaga kerja berpotensi meningkatkan biaya produksi perusahaan dan mengurangi kemampuan perusahaan dalam menyerap tenaga kerja.

Oleh karena itu, kebijakan pengupahan perlu diimbangi dengan program peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, pengembangan keterampilan berbasis industri, serta peningkatan kualitas pendidikan vokasi agar kesejahteraan pekerja dapat meningkat tanpa mengurangi kesempatan kerja yang tersedia.

3. Bagi Instansi Ketenagakerjaan dan Dunia Usaha

Dinas Ketenagakerjaan serta pelaku usaha diharapkan dapat memperkuat kerja sama dalam penyediaan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pelatihan tersebut perlu difokuskan pada peningkatan keterampilan teknis, kemampuan digital, serta kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja saat ini. Selain itu, perusahaan diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam program pemagangan, pelatihan berbasis kompetensi, dan penyerapan tenaga kerja lokal sehingga dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.

4. Bagi Masyarakat dan Angkatan Kerja

Masyarakat, khususnya penduduk usia produktif, diharapkan terus meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan, dan kompetensi kerja agar mampu bersaing dalam pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif. Selain mengandalkan pendidikan formal, masyarakat juga perlu memanfaatkan berbagai program pelatihan dan sertifikasi yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun sektor swasta untuk meningkatkan peluang memperoleh pekerjaan.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan variabel Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Upah Minimum kabupaten/kota (UMK),

dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dalam menjelaskan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang secara teoritis berpengaruh terhadap tingkat pengangguran, seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi, kemiskinan, jumlah penduduk, struktur industri, dan kesempatan kerja.

Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan periode penelitian yang lebih panjang, wilayah penelitian yang lebih luas, maupun metode analisis yang lebih komprehensif sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih mendalam dan akurat mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia.

5.3 Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian mengenai pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Upah Minimum kabupaten/kota (UMK), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2016–2025 memberikan beberapa implikasi yang dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah, khususnya di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan.

1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Temuan ini memperkuat teori *Human Capital* yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia yang mampu meningkatkan produktivitas, keterampilan, dan daya saing tenaga kerja. Semakin

tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin besar peluang untuk memperoleh pekerjaan sehingga tingkat pengangguran dapat ditekan.

Selain itu, hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Upah Minimum kabupaten/kota (UMK) berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka mendukung teori pasar tenaga kerja yang menjelaskan bahwa peningkatan tingkat upah yang tidak diimbangi oleh peningkatan produktivitas tenaga kerja berpotensi mengurangi permintaan tenaga kerja dari sisi perusahaan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan berkurangnya penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya jumlah pengangguran.

Temuan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka juga memperkuat teori pasar tenaga kerja yang menjelaskan bahwa peningkatan jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh pertumbuhan kesempatan kerja akan meningkatkan jumlah pencari kerja yang tidak terserap dalam pasar kerja sehingga berdampak pada peningkatan pengangguran.

2. Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan memiliki peran penting dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu terus meningkatkan akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan melalui program wajib belajar, bantuan pendidikan, penguatan pendidikan vokasi, serta peningkatan keterampilan berbasis kebutuhan industri. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Temuan penelitian yang menunjukkan pengaruh positif UMK terhadap TPT mengindikasikan bahwa kebijakan pengupahan perlu dirancang secara lebih seimbang. Penetapan UMK tidak hanya mempertimbangkan aspek kesejahteraan pekerja, tetapi juga harus memperhatikan produktivitas tenaga kerja, kondisi dunia usaha, kemampuan perusahaan, serta kapasitas penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, kebijakan pengupahan dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan usaha.

Di sisi lain, pengaruh positif TPAK terhadap TPT menunjukkan bahwa peningkatan jumlah angkatan kerja harus diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong investasi, memperkuat sektor industri padat karya, mengembangkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatkan kualitas pelayanan investasi guna memperluas kesempatan kerja di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.

3. Implikasi Praktis

Bagi dunia usaha, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja, pengembangan kompetensi, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Perusahaan diharapkan tidak hanya berfokus pada efisiensi biaya tenaga kerja, tetapi juga meningkatkan kualitas tenaga kerja agar mampu menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi.

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa pendidikan dan keterampilan kerja merupakan faktor penting dalam meningkatkan peluang memperoleh pekerjaan. Oleh karena itu, masyarakat perlu terus

meningkatkan kualitas pendidikan dan kompetensi yang dimiliki agar mampu bersaing dalam pasar kerja yang semakin kompetitif.

Bagi pemerintah daerah dan instansi ketenagakerjaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif, terutama dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, dan penguatan keterkaitan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat memerlukan pendekatan yang terintegrasi melalui peningkatan kualitas pendidikan, pengelolaan kebijakan pengupahan yang tepat, serta penciptaan lapangan kerja yang mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusalim, L., & Novianti, T. (2024). Pembuktian Empiris Teori Upah Efisiensi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 14(2), 121–135.
- Agustina, M., Astuti, H., & Susilo, J. H. (2023). Unemployment in Indonesia: An Analysis of Economic Determinants from 2012-2021. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 12(1), 69–82.
- Alhumami, A. (2025). Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk Mewujudkan SDM Unggul yang Produktif. In Bappenas Working Papers (Vol. 8, Number 3). Ministry of National Development Planning/Bappenas RI. <https://doi.org/10.47266/bwp.v8i3.473>
- Amalia, L., Putri, R. N., & Aprelia, R. W. P. (2024). Pengaruh IPM, UMK, Pertumbuhan Ekonomi, dan TPAK terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. *Journal Of Economics*, 4(3), 11–25.
- Amin, A. N., Rianti, E. A., Hanggarany, P., & Yunilasari, S. (2023). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sebelum Dan Sesudah Krisis Moneter (Periode 1978-2018). *Journal of Comprehensive Science*, 2(11), 1916–1921.
- Athallah, A. N., Kusuma, A. S., Azzahra, R. D., Mukti, D. V., Rionanda, R. A. Z., Putri, A. S., & Rachmat, F. A. (2025). Pengaruh Upah Minimum, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2015-2023. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2025a). Direktori Industri Manufaktur Jawa Barat 2025. <https://jabar.bps.go.id/id/publication/2025/12/31/c637908bff02f72240ba950c/direktori-industri-manufaktur-jawa-barat-2025.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2025b). Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Hasil Sensus Penduduk 2020, 2025. https://jabar.bps.go.id/en/statistics-table/2/OTlwZl%3D/jumlah-penduduk-jawa-barat--2025.html?utm_source=chatgpt.com
- Baltagi, B. H. (2021). *Econometric Analysis of Panel Data*. Springer International Publishing.
- Batubara, M. S. R. A. S. (2021). Pengaruh Aglomerasi, Tenaga Kerja, Pertumbuhan Penduduk, Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2020. *Diponegoro Journal Of Economics*, 10(4), 350–360.
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education National Bureau of Economic Research*. University of Chicago Press.

- BPS. (2023, October 4). Mengenal Konsep Dasar Ketenagakerjaan BPS. <https://brebeskab.bps.go.id/id/news/2023/10/04/635/mengenal-konsep-dasar-ketenagakerjaan-bps.html>
- BPS. (2024a, October 11). Indikator Peningkatan Akses Pendidikan. <https://metrokota.bps.go.id/id/news/2024/10/11/101/indicator-of-improved-educational-access.html>
- BPS. (2024b, November 18). Paham Data #TPT. <https://lebongkab.bps.go.id/id/news/2024/11/18/196/paham-data--tpt.html>
- BPS. (2025, August 30). Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur ≥15 Tahun (Tahun), 2024. <https://kepri.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjk5lzl=/rata-rata-lama-sekolah-penduduk-umur----15-tahun.html>
- Detik Jabar. (2025, December 17). Jabar Masuk 10 Besar Tingkat Pengangguran Tertinggi di Indonesia. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-8262546/jabar-masuk-10-besar-tingkat-pengangguran-tertinggi-di-indonesia>
- Djunaidi, D., & Alfritri, A. (2022). Dilema industri padat modal dan tuntutan tenaga kerja lokal. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 8(1), 29–40.
- Doeringer, P., & Piore, M. (1971). *Internal Labor Markets and Manpower Analysis*. Armonk, N.Y. : M.E. Sharpe.
- DPRD Provinsi Jawa Barat. (2024, November 26). Tingkat Pengangguran Terbuka Jabar Tertinggi Nasional, DPRD Jawa Barat Kritik Soal Investasi dan Daya Serap Tenaga Kerja. <https://dprd.jabarprov.go.id/berita/403/tingkat-pengangguran-terbuka-jabar-tertinggi-nasional-dprd-jawa-barat>
- Faishal. (2024). Relevansi Kurikulum Lembaga Pendidikan Dengan Kebutuhan Dunia Kerja. *Ta'dibi : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 13(1), 84–111.
- Feriyanto, N. (2025). Ekonomi Sumber Daya Manusia: Teori dan Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia. *Deepublish*.
- George J. Borjas. (2016). *Labor Economics* (Vol. 7). McGraw-Hill Education.
- Ghinastri, S. L., & Syafitri, W. (2024a). Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (Umk) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) dan Kemiskinan. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(1), 72–83.
- Ghinastri, S. L., & Syafitri, W. (2024b). Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Kemiskinan. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(1), 72–83.
- Hafid, I. K. A., Kasmira, Redianto, & Purnamawati. (2025). Peningkatan Kompetensi Kejuruan Melalui Integrasi Kurikulum Industri Di Pendidikan Vokasi: *Tinjauan Literatur. Ural Pendidikan Dan Profesi Keguruan*, 4(2), 196–207.

- Irawan, F. C. (2022). Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pengangguran Terbuka Di Provinsi Banten Tahun 2000-2020. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 6(1), 49–58.
- Jannah, M., & Septianingtias, I. A. (2025). Analisis Perbandingan Upah Minimum Provinsi (UMP) antara Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa Tahun 2024 Menggunakan Uji Mann-Whithney. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(5), 557–563.
- Juliani, W., & Adha, L. H. (2025). Tinjauan Yuridis Ketentuan Upah Minimum Sebagai Upaya Perlindungan Kesejahteraan Bagi Pekerja atau Buruh Menurut Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 5(1).
- Kurniawan, A. (2024). Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah: Analisis Regresi Data Panel. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 22(2), 123–136.
- Manaf, S. (2023). *Tori Ekonomi Makro*. Penerbit Buku Indonesia. www.penerbitbukuindonesia.com
- Muh Azril, A. (2026). Determination of Unemployment in West Java Province: Panel Data Study. *Bulletin of Economic Studies (BEST)*, 6(1), 47–57.
- Mustakim, A., Ferlin, & Rizal. (2022). Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Kendari Tahun 2010-2021. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 209–216.
- N. Gregory Mankiw. (2018). *Principles of Economics*. Cengage Learning.
- Noviyanti, D. (2021). Determinan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Pengembangan Jawa Barat Tahun 2014-2018 dengan Pendekatan Regresi Panel Spasial. *Seminar Nasional Official Statistics*, 878–887.
- Nurhaila, & Anwar, K. (2024). Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 6(3), 38–48.
- Olii, C. F. R., & Dewi, Y. S. (2023). Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia: Tantangan dan Solusi dalam Konteks Perekonomian Pasca-Pandemi.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2024, May 7). Perekonomian Jabar Triwulan I - 2024 Tumbuh, Pengangguran Turun . <https://jabarprov.go.id/berita/perekonomian-jabar-triwulan-i-2024-tumbuh-pengangguran-turun-13401>
- Permadi, E., & Chrystanto, E. (2021). Analisa Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2018. *Journal of Economics*, 5(2), 86–95.

- Permana, D. C., Ferdiansyah, R., Safira, F. P., Gumilang, Z. T. A., Pangestu, A. J., & Rozak, R. W. A. (2025). Revolusi Industri 4.0 dan Otomatisasi: Antara Produktivitas, Risiko, dan Etika Sosial. **Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Bisnis**, 4(1).
- Permatasari, D., Winanto, A. R., & Abas, S. (2024). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum Provinsi, dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2010-2023. **JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)**, 8(3), 1179–1188.
- Ponto, V. M. (2023). Peningkatan Produktivitas Dalam Rangka Mewujudkan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Tujuan ke-8 Sustainable Development Goals). **Cendekia Niaga Journal of Trade Development and Studies**, 7(1), 85–96.
- Porter, D. C. , G. S. (2012). **Basic econometrics**. Chennai: McGraw-Hill Education (India) Private Limited.
- Pratama, A. W., & Taufiqurrachman, F. (2025). Media Trend Sectoral Classification and Inequality of Kedungsepur National Strategic Area of Central Java Province. **MediaTrend**, 20(1), 155–169.
- Putri, A. K., Wibowo, W., Haryanto, A. E. P., & Fauzi, I. N. (2026). Analisis Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur Tahun 2021. **CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan**, 6(2), 795–806.
- Qushoy, L. N., Murniati, N., & Marzan, J. (2022). Determinan Pertumbuhan Sektor Industri Jawa Barat (Studi Pada 10 Kabupaten/Kota). **Jurnal Riset Ilmu Ekonomi**, 2(2), 89–96.
- Raharjo, M. S. P., Borman, S., Sidarta, D. D., & Irawan, S. (2025). Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Upah Minimum di Indonesia. **Open Journal Systems**, 19(9), 6337–6348.
- Rahmah, H. A., Tamamudin, & Sadali, A. (2025). Analisis Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka di 38 Provinsi Periode 2021-2025. **Journal Social Society**, 5(1), 241–259.
- Rahman, N. A., & Riani, N. Z. (2023). Analisis Pengangguran Terbuka di Indonesia. **Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan**, 5(3), 43–50.
- Ramadani, G., & Iskandar, D. D. (2024). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Tenaga Kerja di Indonesia tahun 2015-2023. **Diponegoro Journal of Economics**, 13(3), 35–42.
- Rizki, M. I., & Taqiyyuddin, T. A. (2021). Pemodelan Regresi Kuantil Pada Tingkat Pengangguran Terbuka (Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2020). **Departemen Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran**.
- Ferdinand, J., Ardiana, O. D., Azzahra, D., Putri, M. S., & Satino. (2024). Analisis Ketidakesesuaian Upah Buruh Dengan Perbandingan Upah Minimum Regional. **Jurnal Ilmiah Multidisiplin**, 2(6), 56–61.

- Salsabila, A. H., Rahmatillah, A. E., Arwansa, D., Mukharohmah, M. S., & Septiani, Y. (2025). Dampak upah minimum, IPM, dan partisipasi angkatan kerja terhadap pengangguran: Analisis data panel lima kabupaten Jawa Tengah. ***Journal of Economics Research and Policy Studies***, 5(1), 245–260.
- Saputri, Y. G., & Arif, M. (2023). Ketimpangan Wilayah Urban di Provinsi Jawa Barat dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. ***JPEKBM (Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis Dan Manajemen)***, 7(1), 125.
- Sari, M. N. (2024). ***Metode Penelitian Kualitatif (Konsep & Aplikasi)*** (F. Kurniadi & L. A. Abdillah, Eds.). Mega Press Nusantara.
- Sholihah, N. N., & Abdullah, M. N. A. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Aktif Di Indonesia. ***Sabana: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara***, 3(2), 131–138.
- Siagian, R. (2023). ***Ekonomi Sumber Daya Manusia (Membangun Kemakmuran Melalui Potensi Manusia)***. Mega Press Nusantara.
- Sidik, F., & Riofita, H. (2025). Pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran. ***Jurnal Pendidikan Tambusai***, 9(2), 14788–14796.
- Sigalingging, A. R., Silalahi, A. R., Mahendra, D. R., Jonatan, H., & Purwoto, A. (2024). Determinan Ketimpangan Pendidikan di Indonesia Tahun 2022. ***Jurnal Ilmiah Multidisiplin***, 2(7), 284–292.
- Smith, M. (2023). ***Adam Smith on Growth and Economic Development***. History of Economics Review, 86(1), 2–15.
- Sugiyono. (2018). ***Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D***. Alfabeta.
- Sutisna, U., Sutisna, R. A., & Morisson, B. (2025). Pusat dan Periphery: Memahami Ketimpangan Ekonomi Antar Wilayah di Indonesia dan Solusi Pembangunan Berkelanjutan. ***Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah***, 7(4).
- Taufiqqurrachman, F. (2025). Leading Sectors and Inequality in Urban Areas of DKI Jakarta Province. ***Media Trend***, 20(1), 1–12.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2021). ***Economic Development (13th Edition)***. Pearson Education Limited.
- Widiantari, I. A. A., & Suriadi, I. (2024). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Jumlah Penduduk, dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. ***Jurnal Oportunitas: Ekonomi Pembangunan***, 3(1), 58–64.
- Wijaya, E., Suprayitno, D., & Ladini, U. (2024). ***Buku Ajar Ekonometrika*** (E. Efitra & N. Safitri, Eds.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Zuhroh, I., & Amir, F. (2021). ***Ekonometrika dengan Software EViews***. UMMPress.